

## **Evaluasi *Corporate Governance* pada Koperasi Serba Usaha (Studi Kasus: KSU Harapan Bersama)**

### ***Corporate Governance Evaluation In Multiple Business Cooperatives (Case Study: Harapan Bersama Multi-Business Cooperative)***

**Nurul Mahmudah<sup>1</sup>,  
Ghea Dwi Rahmadiane<sup>2</sup>,**

<sup>1,2</sup>Program Studi Sarjana Terapan  
Akuntansi Sektor Publik,  
Politeknik Harapan Bersama  
Indonesia.

Surel Korespondensi:  
nurulmahmudah1989@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan *corporate governance* pada koperasi serba usaha harapan bersama. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dalam penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber publikasi. Dalam analisis data, distribusi frekuensi digunakan untuk mengklasifikasikan pernyataan atau pernyataan yang dibuat oleh responden tentang isu-isu yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance* dari ketiga aspek yaitu akuntabilitas organisasi dan manajemen, akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota, akuntabilitas keuangan. Hasil analisis pada penelitian ini bahwa aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen dari total 11 indikator menyatakan bahwa 9 indikator menerapkan dengan baik dan lengkap sedangkan 2 indikator belum menerapkan dengan baik dan lengkap. Aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota menyatakan bahwa dari total 13 aspek 9 indikator telah menerapkan dengan baik dan lengkap sedangkan 4 indikator belum menerapkan dengan baik dan lengkap. Aspek akuntabilitas keuangan dari total 10 indikator ada 7 menerapkan dengan baik dan lengkap, 2 indikator belum menerapkan dengan baik dan lengkap sedangkan 1 indikator tidak menerapkan sama sekali.

**Kata Kunci:** Koperasi, perekonomian rakyat, Akuntabilitas, *Corporate Governance*

#### **Abstract**

*This study aims to evaluate the implementation of corporate governance in multi-purpose cooperatives. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from field surveys by distributing questionnaires to respondents, while secondary data was obtained from various publication sources. Data analysis uses frequency distribution to*

*classify statements or statements from respondents on matters relating to the implementation of corporate governance from three aspects, namely organizational and management accountability, business accountability and member services, financial accountability. The results of the analysis in this study showed that the organizational and management accountability aspects of a total of 11 indicators stated that 9 indicators implemented properly and completely while 2 indicators had not implemented properly and completely. The aspect of business accountability and member service states that out of a total of 13 aspects, 9 indicators have been implemented properly and completely, while 4 indicators have not been implemented properly and completely. From a total of 10 indicators, there are 7 aspects of financial accountability that are implemented properly and completely, 2 indicators have not been implemented properly and completely, while 1 indicator has not been implemented at all.*

**Keywords:** Cooperatives, people's economy, Accountability, Corporate Governance

## PENDAHULUAN

Perkembangan koperasi Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi bertambah sebanyak 39.077 unit koperasi pada tahun 2009-2014, kemudian jumlah anggota koperasi bertambah sebanyak 7.203.682 orang. Pertumbuhan koperasi yang semakin meningkat mungkin tidak membangkitkan minat untuk bergabung dengan koperasi karena koperasi di Indonesia masih jauh dari usaha lain. Koperasi harus melakukan perubahan untuk beradaptasi dengan pembangunan dengan membuat program pemberdayaan koperasi, peningkatan sumber daya manusia dan mengelola pengelolaan informasi sumber daya. (Firmani, 2022)

Penerapan sistem *Corporate Governance* perusahaan yang berlaku pada koperasi menjadi penting agar pengurus koperasi dapat mengubah sistem organisasi dengan tujuan kinerja yang baik, pengendalian intern dan mengurangi kelemahan dalam pengelolaan koperasi yang profesional, bertanggung jawab dan berfungsi dengan baik. dengan pemangku kepentingan dan pemegang saham. Sinyal atau informasi yang diharapkan anggota dapat membantu mengembangkan koperasi yang masih memiliki keterbatasan struktural dalam penguasaan faktor-faktor produksi khususnya modal. (Sakti, 2021)

Kontrol internal organisasi yang lemah menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan. Simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan. Berbagai fenomena dapat terjadi, termasuk kesalahan deteksi

(human error) yang menimbulkan masalah antara karyawan dan manajemen. (Permana et al., 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang terdampak Covid 19, sehingga perekonomian Indonesia terancam, terutama di berbagai sektor yang mengalami resesi. (Tantangan et al., 2007) Pakpahan (2020) mencatat bahwa pandemi COVID-19 memberikan tiga dampak bagi Indonesia yaitu sektor pariwisata, perdagangan dan investasi. Di sisi lain, sektor jasa atau lembaga keuangan juga mengalami ketakutan akibat pandemi, termasuk masalah pembayaran utang atau pinjaman kepada nasabah atau anggota, karena situasi yang tidak menentu ini menyebabkan keterlambatan pembayaran nasabah atau pelunasan pinjaman bagi anggota dan Dampaknya. (Iqbal, 2020) tentang Hasil Berkelanjutan. Perlambatan pertumbuhan sektor riil mempengaruhi hasil koperasi. Hasil keuangan menggambarkan hasil yang dicapai oleh koperasi selama kegiatannya. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metrik, salah satunya adalah analisis pelaporan keuangan. Tujuan dari analisis neraca adalah untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan perubahannya pada setiap periode. (Wijayanti & Utomo, 2017)

Hal senada diungkapkan (Hamzah, 2021) dalam penelitiannya bahwa permasalahan yang dihadapi koperasi pada masa pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Kuningan harus segera diselesaikan karena tanggung jawab atas permasalahan tersebut bukan hanya pada pengurus koperasi, melainkan pemerintah. harus terlibat dalam mencari solusi, yaitu. memberikan program atau dukungan kepada koperasi agar koperasi dapat terus menjaga konsistensi usahanya. Lembaga keuangan yang merasakan dampak COVID-19 adalah koperasi. (Rosifa, 2019) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pkrian Rakyat, Teten Masduki, mengatakan hingga 1.785 koperasi terdampak pandemi COVID-19 dan pengurus koperasi mengalami penurunan penjualan, kekurangan modal, dan kesulitan distribusi. Jika disimpulkan bahwa lembaga keuangan koperasi saat ini juga sedang memperhatikan kelangsungan usahanya, maka penurunan penjualan akan menyebabkan pendapatan koperasi menjadi lebih rendah, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam meminjamkan dana kepada nasabah atau anggotanya. Menurut (Sriati et al., 2021), hasil kajiannya menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap kemampuan berkolaborasi tidak melemahkan kriteria kinerja kolaboratif, meskipun skor kinerja lebih rendah pada masa pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Namun nilai partisipasi anggota saat pandemi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, karena kriteria dinaikkan dari sedang ke tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permana et al., 2021) , juga mencatat bahwa anggota, karyawan dan pembina koperasi mengalami kendala yang disebabkan oleh gangguan likuiditas dan proses penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami oleh Koperasi Sejahtera Bersama. Pandemi Covid-19 juga menjadi pendorong bersama untuk meningkatkan kerja sama dan membuatnya lebih efisien. Oleh karena itu, penguatan koperasi merupakan langkah strategis untuk memajukan pembangunan nasional. Firmani (2022). Melihat hal tersebut, koperasi tentunya memiliki peluang dan tantangan tersendiri, sebagaimana dikemukakan (Permana et al., 2021) bahwa peluang koperasi di masa pandemi adalah pemanfaatan teknologi yang ada. Dengan kata lain, digitalisasi koperasi sangat dianjurkan untuk kerja yang lebih efisien

dan lebih dinamis. Kita punya banyak. Tantangan yang dihadapi koperasi di masa pandemi adalah modal nasabah yang hanya di kelas UMKM terhenti dan pembayaran pinjaman terhenti atau mangkrak.

Menurut (Astuti & Yulianto, 2021) , berkata jumlah simpanan & penyaluran pinjaman berpengaruh positif & signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam masa pandemi ini mempengaruhi pada sasaran pendapatan jasa simpan pinjam. PKP-RI kabupaten Purworejo permanen optimis pada masa pandemi pada meraih SHU yg optimal. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil & Menengah, angka 20/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pasal 9 ayat 1,2 & 3 mengatur mengenai galat satu prinsip penerapan good corporate governance yaitu penerapan Akuntabilitas dalam koperasi berdasarkan 3 aspek yaitu 1. Akuntabilitas organisasi & manajemen 2. Akuntabilitas bisnis & pelayanan pada anggota, 3. Akuntabilitas Keuangan. Pada penelitian ini pengukuran penerapan *good corporate governance* dalam koperasi memakai indikator-indikator berdasarkan 3 aspek akuntabilitas sebagaimana yg tercantum dalam peraturan menteri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menarik dan menjadi penting untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Evaluasi *Corporate Governance* pada Koperasi Serba Usaha (Studi Kasus: KSU Harapan Bersama). Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi KSU Harapan Bersama yang tidak aktif sangat berhubungan erat dengan buruknya tata kelola *corporate governance*, Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana evaluasi *Corporate Governance* pada Koperasi Serba Usaha (Studi Kasus: KSU Harapan Bersama) yang dilakukan oleh KSU Harapan Bersama dalam hal ini peneliti menggunakan 3 Aspek sebagai Indikator-indikatornya yaitu 1. Akuntabilitas organisasi dan manajemen 2. Akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, 3. Akuntabilitas Keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Koperasi

UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 (pasal 1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang anggotanya menggabungkan kekayaan menjadi modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Jenis-jenis koperasi menurut UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 (Pasal 83) adalah sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen, yaitu menjalankan perusahaan jasa dalam bidang penyediaan barang-barang kebutuhan anggota dan bukan anggota.
2. Koperasi produk yaitu menyelenggarakan usaha jasa dalam bidang perolehan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi dari anggota kepada anggota dan bukan anggota.
3. koperasi jasa, yaitu penyelenggaraan usaha jasa simpan pinjam bagi anggota dan bukan anggota.

4. Koperasi simpan pinjam, yaitu menjalankan usaha simpan pinjam sebagai perusahaan anggota tunggal.

Koperasi sebagai lembaga adalah perusahaan dan/atau badan hukum yang beroperasi dan berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. kolaborasi sebagai mekanisme/proses; Koperasi berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat; Pelaksanaan usaha patungan dengan daya tawar yang kuat berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; pengembangan kreasi dan penemuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing dan ketahanan anggota dan koperasinya terhadap guncangan ekonomi. Dasuki (2018).

### **Prinsip-Prinsip, nilai, dan ciri pada Koperasi**

Menurut UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah gerakan ekonomi nasional dan badan usaha yang bergerak dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai usaha bersama dalam suatu sistem perekonomian yang terstruktur. atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip-prinsip yang harus dianut dan diatur dalam UU No. 12/2012 antara lain: a) Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka, b) Pengawasan anggota dilakukan secara demokratis, c) Anggota berperan aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, d) Koperasi adalah usaha otonom dan mandiri, e) Koperasi menyelenggarakan kursus-kursus pelatihan bagi anggotanya. , pengawas, Pengurus dan pegawai serta menginformasikan kepada masyarakat tentang koperasi tentang identitas, cara kerja dan manfaat, f) koperasi terutama melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan di tingkat lokal. , pada tingkat nasional, regional dan internasional dan g) Koperasi berkomitmen untuk pembangunan lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan melalui kebijakan yang disepakati oleh para anggota.

Ciri-ciri koperasi di Indonesia antara lain (a) koperasi merupakan kumpulan orang banyak dan bukan kumpulan modal. (b) Semua kegiatan dalam koperasi dilakukan secara gotong royong dan gotong royong berdasarkan persamaan, hak dan kewajiban anggotanya, yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial, (c) Kegiatan dalam koperasi dilandasi kesadaran akan anggota.

Sementara itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara yang bertanggung jawab atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik No. PER-01/MBU/2011, prinsip-prinsip GCG yang disebutkan dalam Keputusan ini mencakup lima dimensi sebagai berikut. (Marlina, (2019) dalam Chandra, 2019):

- a. Keterbukaan Informasi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### **Kinerja Koperasi**

Pengertian koperasi Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah koperasi yang merupakan transaksi hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi berdasarkan kegiatan koperasi dan merupakan badan usaha ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Pengukuran dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pendapatan biaya, penggunaan aset, proses operasional pengelolaan kolaboratif organisasi. Mengukur kinerja koperasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang kebutuhan pelatihan, pendidikan, perencanaan dan pemantauan dalam proses pengelolaan koperasi yang lebih luas. (Dasuki, 2018).

Secara internal, akuntabilitas koperasi merupakan sistem pertanggungjawaban yang efektif dalam organisasi koperasi yang dapat mencerminkan kepemimpinan koperasi yang transparan dan akuntabel, yaitu. direktur koperasi yang ditunjuk. (Alang et al., 2019)

### **Indikator Corporate Governance Pada Koperasi**

Pengukuran penerapan tata kelola perusahaan yang baik menggunakan indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 9 (ayat 1,2 dan 3) tentang 3 aspek pelaksanaan akuntabilitas dalam koperasi. Tiga aspek akuntabilitas meliputi: 1). Akuntabilitas organisasi dan manajemen, 2). Akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, 3). Akuntabilitas Keuangan.(Tionardi, 2018) Penggunaan ukuran dengan indikator dari peraturan menteri dirasa lebih tepat untuk jenis usaha koperasi dan sesuai dengan peraturan terkait koperasi. Indikator pengukuran tata kelola perusahaan yang baik pada koperasi dari ketiga aspek di atas adalah sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen dengan indikator terdiri dari: Aspek tanggung jawab organisasi dan manajerial dengan indikator terdiri dari: a) Tersedianya rumusan visi dan misi koperasi. b) Legalitas penuh dari izin untuk kegiatan kolaboratif. c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan. yaitu Penyempurnaan peraturan khusus yang diperlukan untuk koperasi. e) keteraturan organisasi f. Berkomitmen terhadap pelaksanaan tanggung jawab koperasi. G. Persyaratan kualifikasi untuk manajer, supervisor, dan

- co-leader. H. Pelaksanaan pengembangan staf kolaboratif. I. Setoran modal adalah iuran anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. j. pelatihan anggota. k. Menambah jumlah anggota
2. Aspek akuntabilitas usaha dan layanan anggota dengan indikator terdiri dari: a. Perencanaan kinerja, koordinasi dan pemantauan layanan. b. Akuntabilitas dan dokumentasi laporan kinerja layanan. c. Ketersediaan area bisnis jasa dan infrastruktur. yaitu Kinerja Layanan untuk Anggota. e. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan dengan non-anggota. f. Akuntabilitas dan dokumentasi laporan bisnis. G. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan usaha dengan bukan anggota. B. Efisiensi bisnis dengan non-anggota. I Realisasi bagian anggota untuk asumsi layanan dan risiko komersial. j. Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna tergantung dari jumlah anggota yang menggunakan jasa koperasi. k) Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa didasarkan pada pertumbuhan bagian bruto. l. Pelaksanaan pendampingan pembangunan wilayah kerja. m. Laporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan secara bertahap dilaksanakan dalam struktur organisasi koperasi.
  3. Aspek akuntabilitas keuangan dengan indikator yang terdiri dari: a. ketersediaan sistem informasi. b. Transparansi dalam pengelolaan sistem akuntansi. c. Implementasi penegakan kontrol. yaitu Melakukan audit eksternal. e. kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan. f. efektivitas sistem pengendalian internal. G. Pengelolaan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. h) kegiatan jasa dari total neraca. i Kegiatan jasa untuk modal kerja. j. hasil fungsional.

## **METODE**

### **Jenis Data**

Jenis data yg dipakai pada penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang masuk langsung ke koperasi atau, dalam hal apa pun, dikumpulkan bersama. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Informasi dasar berupa observasi dan wawancara dengan Ketua, Pengurus dan Bendahara Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh catatan dan dokumen yang ada di Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini, metode pengumpulan data berikut akan digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan diantaranya:

#### **a. Metode Dokumentasi**

Salah satu cara pendokumentasian adalah dengan mencari dan memperhatikan hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan, risalah rapat, agenda, dan lain-lain. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dan mengumpulkan informasi yang ada pada koperasi serba usaha harapan bersama.

b. Observasi

Penelitian ini, peneliti menangkap dan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung pada koperasi serba usaha harapan bersama.

c. Wawancara

Penelitian ini, peneliti memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara tatap muka dengan ketua, pengelola, dan bendahara koperasi serba usaha harapan bersama.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ketua, pengawas dan bendahara koperasi serba usaha harapan bersama. Penelitian ini menganalisis tentang evaluasi *Corporate Governance* pada koperasi serba usaha (Studi Kasus: Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama).

### Pengukuran Penerapan Indikator *Corporate Governance* pada Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama

Pada penelitian ini pengukuran penerapan *Corporate Governance* pada koperasi menggunakan indikator- indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah, nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 9 (ayat 1,2 dan 3) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Indikator *Good Corporate Governance*

No	Aspek Akuntabilitas	Jumlah Indikator	Pengukuran
1	Organisasi dan Manajemen	11	Penerapan <i>Corporate Governance</i> di ukur dengan menerapkan dengan baik dan lengkap atau tidaknya yang dipersyaratkan dalam indikator
2	Usaha dan pelayanan anggota	13	Penerapan <i>Corporate Governance</i> di ukur dengan menerapkan dengan baik dan lengkap atau tidaknya yang dipersyaratkan dalam indikator
3	Keuangan	9	Penerapan <i>Corporate Governance</i> di ukur dengan menerapkan dengan baik dan lengkap atau tidaknya yang dipersyaratkan dalam indikator

33

Sumber: Wijayanti dan Utomo, (2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### a) Profil Koperasi Harapan Bersama

Koperasi serba usaha harapan bersama didirikan pada tanggal 07 September 2015 yang bergerak dibidang usaha koperasi serba usaha beralamat Jl. Mataram No. 9 Tegal, dibawah binaan Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Tegal. Didirikan nya KSU Harapan Bersama bertujuan Menghimpun dana dari anggota sebagai modal usaha bersama, membangun dan mengembangkan potensi keuangan anggota, membantu anggota menyediakan sumber daya yang diperlukan, mendidik dan melatih anggota agar memiliki bakat dan keterampilan yang bernilai komersial, meningkatkan kesejahteraan melalui berbagi. model, sisa hasil bisnis. KSU Harapan Bersama memiliki komitmen sebagai unit usaha pengadaaan barang dan jasa dengan target sarasannya yaitu politeknik harapan bersama sebagai entitas dan sivitas akademiknya (Pembina, Pengurusan Yayasan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Pegawai Mahasiswa, dll). (RAT, 2020).

#### b) Analisis Penerapan *Corporate Governance* pada KSU Harapan Bersama

Analisis penelitian ini menggunakan 2 aspek diantaranya:

##### 1. Aspek Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen.

Aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen koperasi merupakan Organisasi dan pengurusan serta kepemimpinan koperasi dilaksanakan menurut nilai, asas, jati diri koperasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan dan asas koperasi yang disepakati. (Wijayanti & Utomo, 2017) . Pada penelitian ini untuk aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen koperasi terdiri dari 11 indikator yang diambil melalui wawancara dengan ketua koperasi KSU Harapan bersama, sebagaimana tercantum pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Penerapan Aspek Akuntabilitas Organisasi dan manajemen Koperasi pada KSU Harapan Bersama

No.	Indikator	Keterangan		
		Menerapkan dengan baik dan lengkap	Belum menerapkan dengan baik dan lengkap	Tidak menerapkan sama sekali
1	Tersedianya rumusan visi dan misi koperasi.	v		
2	Kelengkapan legalitas perijinan kegiatan perusahaan koperasi.		v	
3	Ketaatan pelaksanaan RAT sesuai peraturan perundang-undangan.	v		
4	Kelengkapan peraturan khusus yang perlu ada di koperasi.		v	
5	Ketertiban penyelenggaraan organisasi	v		
6	Adanya komitmen untuk	v		

	menjalankan akuntabilitas koperasi	
7	Persyaratan kompetensi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.	v
8	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi.	v
9	Adanya partisipasi anggota dalam kontribusi modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.	v
10	Pendidikan anggota.	v
11	Peningkatan jumlah anggota	v

Sumber: Data Wawancara (2022)

Berdasarkan analisis pada tabel 2 yang diperoleh dari wawancara langsung dengan ketua KSU Harapan Bersama, dari total 11 indikator untuk aspek Aspek Akuntabilitas Organisasi dan manajemen terdapat 9 aspek yang sudah menerapkan dengan baik dan lengkap, akan tetapi ada 2 indikator yang masih belum menerapkan aspek tersebut dengan baik dan lengkap.

## 2. Aspek Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota.

Aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota merupakan Tanggung jawab penyelenggaraan usaha dan pelayanan yang lebih baik kepada anggota dan masyarakat sekitar sesuai Rencana Kerja (RK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di wilayah kerja koperasi. (Wijayanti & Utomo, 2017). Pada penelitian ini untuk Aspek Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota. koperasi terdiri dari 13 indikator yang diambil melalui wawancara dengan ketua koperasi KSU Harapan bersama, sebagaimana tercantum pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Penerapan Aspek Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota Koperasi pada KSU Harapan Bersama

No	Indikator	Keterangan		
		Menerapkan dengan baik dan lengkap	Belum menerapkan dengan baik dan lengkap	Tidak menerapn sama sekali
1	Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan.	v		
2	Pertanggungjawaban dan dokumentasi laporan kegiatan pelayanan.	v		
3	Ketersediaan sarana dan prasarana usaha pelayanan..	v		
4	Kinerja efektifitas pelayanan kepada anggota.	v		
5	Kinerja perencanaan, koordinasi dan pengendalian bisnis dengan non anggota.		v	

6	Pertanggung jawaban dan dokumentasi laporan kegiatan bisnis.	v	
7	Ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bisnis dengan non anggota.		v
8	Kinerja efektifitas bisnis dengan non anggota.		v
9	Kinerja partisipasi anggota dalam menanggung resiko pelayanan dan bisnis.	v	
10	Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi.	v	
11	Tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna jasa berdasarkan pertumbuhan partisipasi bruto.	v	
12	Kinerja bantuan pembangunan daerah kerja.		v
13	Pelaporan pertanggungjawaban pada tingkat penanggung jawab kepada atasannya dan dibuat secara berjenjang dalam struktur organisasi koperasi	v	

Sumber: Data Wawancara (2022)

Berdasarkan analisis yang ada di tabel 3 diperoleh dari wawancara langsung dengan ketua KSU Harapan Bersama, dari total 13 indikator untuk aspek Aspek Akuntabilitas Organisasi dan manajemen terdapat 9 aspek yang sudah menerapkan dengan baik dan lengkap, akan tetapi ada 4 indikator yang masih belum menerapkan aspek tersebut dengan baik dan lengkap.

### 3. Aspek Akuntabilitas Keuangan

Aspek akuntabilitas keuangan merupakan Pelaksanaan tanggung jawab keuangan secara bertahap sesuai tingkatan tanggung jawab, penyusunan laporan keuangan terkendali, transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi komunitas tanpa tanggung jawab publik (SAK-ETAP). (Marlina, 2019) Pada penelitian ini untuk Aspek Akuntabilitas Keuangan. koperasi terdiri dari 13 indikator yang diambil melalui wawancara dengan ketua koperasi KSU Harapan bersama, seperti yang tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Penerapan Aspek Akuntabilitas Keuangan Koperasi pada KSU Harapan Bersama

No	Indikator	Keterangan		
		Menerapkan dengan baik dan lengkap	Belum menerapkan dengan baik dan lengkap	Tidak menerapkan sama sekali
.				
1	ketersediaan sistem informasi.	v		
2	Transparansi pengelolaan sistem akuntansi.	v		

3	kinerja pelaksanaan pengawasan.	v	
4	kinerja pelaksanaan audit external.		v
5	kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan.	v	
6	kinerja sistem pengendalian internal.	v	
7	pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.	v	
8	aktivitas pelayanan atas total <i>asset</i> .	v	
9	Aktivitas pelayanan atas modal kerja.	v	
10	hasil kinerja operasional.	v	

Sumber: Data Wawancara (2022)

Berdasarkan analisis pada tabel 4 yang diperoleh dari wawancara langsung dengan ketua KSU Harapan Bersama, dari total 10 indikator untuk aspek Aspek Akuntabilitas Organisasi dan manajemen terdapat 7 aspek yang sudah menerapkan dengan baik dan lengkap, sedangkan ada 2 indikator yang masih belum menerapkan aspek tersebut dengan baik dan lengkap, serta terdapat 1 indikator yang tidak menerapkan sama sekali.

## Pembahasan

### **Penerapan Aspek Akuntabilitas Organisasi dan manajemen Koperasi di KSU Harapan Bersama.**

Implementasi aspek akuntabilitas organisasi dan pengelolaan koperasi di KSU Harapan Bersama sudah terlihat adanya aspek pencapaian, hal ini dibuktikan dengan sembilan indikator telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap, salah satu indikatornya adalah komitmen dalam menjalankan akuntabilitas koperasi. Namun, masih terdapat dua indikator yang belum terlaksana dengan baik dan lengkap, salah satunya kelengkapan legalitas perizinan kegiatan perusahaan koperasi. Hal ini masih menjadi evaluasi kedepan dalam penerapan GCG di koperasi KSU Harapan Bersama untuk dapat memperbaiki indikator-indikator yang belum menerapkan aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen dengan baik.

### **Penerapan Aspek Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota Koperasi di KSU Harapan Bersama.**

Penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota koperasi di KSU Harapan Bersama sudah dapat melaksanakan beberapa aspek dengan baik dan lengkap, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang masih menunjukkan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota koperasi yang belum dilaksanakan. dengan benar dan lengkap. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 9 indikator yang telah terlaksana dengan baik dan lengkap, salah satunya adalah tingkat partisipasi anggota sebagai pengguna berdasarkan jumlah anggota yang menggunakan layanan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama telah mampu

menerapkan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota. Selain itu terdapat indikator yang belum terlaksana dengan baik dan lengkap salah satunya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan usaha dengan non anggota, indikator ini merupakan salah satu indikator yang implementasinya kurang baik dan lengkap, hal ini dikarenakan masih terdapat sarana dan prasarana kegiatan unit usaha dari non anggota belum berjalan dengan baik.

### **Penerapan Aspek Akuntabilitas Keuangan Koperasi di KSU Harapan Bersama.**

Pelaksanaan aspek pertanggungjawaban keuangan koperasi di KSU Harapan Bersama telah dilakukan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dengan tingkat pertanggungjawaban secara bertahap. Terlihat bahwa ketujuh indikator tersebut dapat diterapkan dengan baik dan lengkap, salah satunya adalah kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan. Berbeda dengan 3 indikator yang belum menerapkan aspek akuntabilitas keuangan dengan baik dan lengkap, salah satunya adalah kinerja pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek akuntabilitas keuangan koperasi di KSU Harapan Bersama Masih terdapat indikator-indikator yang belum terlaksana dengan baik dan sepenuhnya.

### **Evaluasi Corporate Governance Koperasi di KSU Harapan Bersama.**

Adapun evaluasi *Corporate Governance* pada KSU Harapan Bersama berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan melihat beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Organisasi Dan Manajemen

Organisasi dan Manajemen sudah berjalan dengan baik berdasarkan rencana kerja pengurus tahun 2021 seluruh rencana kerja sudah dilaksanakan.

b. Bidang Usaha

Simpan pinjam berjalan cukup baik dan dirasakan manfaatnya oleh anggota

c. Bidang Permodalan

Berjalan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

a. Keaktifan anggota yang dipotong gaji untuk memenuhi kewajiban berupa simpanan wajib secara rutin tiap bulan

b. Modal koperasi masih bermitra dengan pihak ketiga (Bank). Untuk memupuk modal adalah dari anggota dari sisi lain jumlah keanggotaannya semakin menurun.

d. Bidang Keuangan

Semua transaksi keuangan berjalan dengan baik dan telah tercatat dalam buku administrasi keuangan. keuangan yang ada di koperasi cukup mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota sehingga perlu keaktifan anggota untuk pinjam di Koperasi Serba Usaha Harapan Bersama.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Implementasi Aspek Akuntabilitas Organisasi dan Manajemen Koperasi di KSU Harapan Bersama, menunjukkan dari total sebelas indikator sembilan indikator telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap, namun ada 2 indikator yang belum dilaksanakan dengan baik dan lengkap yaitu Legalitas sempurna. Persetujuan koperasi Kelengkapan peraturan khusus yang diperlukan untuk koperasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengurus lama yang terhambat menyelesaikan perizinan dan adanya SOP atau peraturan tentang pinjaman uang di lingkungan KSU Harapan Bersama.

Implementasi Aspek Akuntabilitas Usaha dan Pelayanan Anggota Koperasi di KSU Harapan Bersama berjalan dengan baik, dibuktikan dengan sembilan indikator yang benar dan terlaksana dengan baik, namun masih ada indikator yang belum terlaksana dengan baik dan benar, termasuk kinerja. Perencanaan usaha, koordinasi dan pengendalian dengan non anggota, ketersediaan sarana dan prasarana usaha dengan bukan anggota, pelaksanaan efektivitas usaha dengan bukan anggota. Hal ini disebabkan masih kurangnya komitmen dari non anggota terhadap peraturan yang ada di KSU Harapan Bersama dan KSU belum memiliki gedung atau tempat khusus untuk unit usaha non anggota.

Implementasi Aspek Akuntabilitas Keuangan Koperasi di KSU Harapan Bersama. Pelaksanaan Aspek Akuntabilitas Keuangan Koperasi di KSU Harapan Bersama telah melaksanakan pelaksanaan akuntabilitas keuangan secara bertahap, namun Masih terdapat indikator yang belum dilaksanakan dengan baik dan lengkap yaitu kinerja pelaksanaan pengawasan, dan kinerja pengurus. sistem pengendalian intern. Hal ini dikarenakan pengurus dan pengawas belum melaksanakan kinerja pengawasannya secara optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawas di KSU Harapan Bersama. Selain itu, terdapat juga indikator yang sama sekali tidak menerapkan aspek akuntabilitas keuangan yaitu kinerja pelaksanaan audit eksternal, hal ini disebabkan ketidaksiapan KSU Harapan Bersama dalam melakukan pengawasan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

### Saran

Adapun saran-saran yang diberikan terkait dengan evaluasi penerapan *Corporate Governance* yang baik bagi koperasi KSU Harapan Bersama yang merujuk pada beberapa indikator-indikator dari tiga bidang tanggung jawab (organisasi dan manajemen, ekonomi dan pelayanan anggota, keuangan). masih lemah penerapannya sebagai berikut:

- Aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen.  
Pada aspek akuntabilitas organisasi dan manajemen KSU Harapan Bersama harus mampu menyelesaikan dan melengkapi legalitas penuh izin untuk beroperasi di koperasi dan peraturan khusus yang diperlukan dalam koperasi.
- Aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan anggota.

Pada aspek usaha dan pelayanan anggota harus mampu meningkatkan Perencanaan kinerja, koordinasi dan monitoring transaksi non member, penyediaan sarana dan prasarana transaksi non anggota, Meningkatkan kinerja efektifitas bisnis dengan non anggota.

➤ Aspek akuntabilitas keuangan.

Pada aspek akuntabilitas keuangan harus mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan pengawasannya, meningkatkan kinerja sistem pengendalian internal serta melakukan kinerja pelaksanaan audit external.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alang, J. A., Sauw, H. M., & Bire, R. (2019). Implementasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen bagi Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri di Kupang. *Jurnal Penelitian Manajemen ...*, 4(1), 19–23.  
<https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/391>
- Astuti, H. W., & Yulianto, W. (2021). Pengaruh Jumlah Simpanan dan Penyaluran Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6749–6760.
- Dasuki, R. E. (2018). Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Study and Management Research*, 15(1), 53.  
<https://doi.org/10.55916/smart.v15i1.9>
- Firmani, P. S. (2022). Kebijakan Keringanan Denda Di Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi Br. Daging Tanggluk Kesiman Pada Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.47532/jis.v5i2.379>
- Hamzah, A. (2021). Dampak Pandemi Covid - 19 Terhadap Koperasi Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 99–113.
- Implikasi, C.-, & Usaha, B. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 20(April).
- Iqbal. (2020). Economic bosowa journal edisi xxxvi juli s/d september 2020. *Journal, Economic Bosowa*, 6(004), 1–12. file:///C:/Users/Smile/Downloads/manajemen sumber daya manusia ( PDFDrive.com ).pdf
- Marlina, E. (2019). Pengaruh good cooperative governance terhadap kinerja koperasi di Kota Pekanbaru , Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 11–21.
- Permana, A., Puspa, R., & Widyanty, W. (2021). Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan dan Operasional di KSP Sejahtera Bersama Cabang Serang. *Jurnal Doktor Manajemen (JDM)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.22441/jdm.v4i1.12105>
- Rosifa, S. N. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Asas Good Corporate Governance Melalui Pengendalian Internal Pada Aktivitas Simpan Pinjam Pada Koperasi Sumber Daya Makmur Di Sidoarjo*. 3.
- Sakti, D. P. B. (2021). Tata Kelola Koperasi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 23–33.
- Sriati, S., Elprina, P., & Siregar, S. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Koperasi BMT TransMekar Sari Mandiri di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin. *IJFAC (Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry)*, vol.7, No., 28–45.
- Tantangan, P. D. A. N., Mikroalga, P., & Biofuel, S. (2007). *Peluang dan tantangan*. 34–40.
- Tionardi, E. F. (2018). Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.2. *Calyptra*, 2(2), 1–12.
- Wijayanti, A. K., & Utomo, M. N. (2017). Kajian Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Koperasi-koperasi di Kota Tarakan). *Ekonomika*, 8(1), 1–22.